

# Penerbitan Izin Hutan Sosial Ditingkatkan

● ADINDA PRYANKA

## Tantangan terbesar implementasi hutan sosial adalah pendampingan petani.

JAKARTA — Setelah pencadangan hutan sosial mencapai target, pemerintah tengah berupaya meningkatkan penerbitan izin hutan sosial. Implementasi hutan sosial dengan baik diproyeksi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mencatat, pemetaan dan pencadangan hutan sosial sudah mencapai 13 juta hektare. Angka tersebut melebihi target dalam Nawacita, yakni 12,7 juta hektare.

Tindak lanjut dari pemetaan dan pencadangan ini adalah mendistribusikan izin. Menurut Siti, proses ini menjadi tantangan besar karena harus melibatkan banyak pihak, baik pemerintah daerah (pemda), aktivis, maupun akademisi, untuk terus mendampingi masyarakat.

Menurut catatan Kementerian LHK, realisasi izin perhutanan sosial sampai Desember 2019 adalah 2.504.197 hektare yang dibagikan ke

sekitar 586 ribu kepala keluarga (KK). Total itu tercatat dalam 5.391 surat keputusan (SK) yang tersebar di 305 Kabupaten.

Sepanjang 2018, rata-rata pemberian izin perhutanan sosial sebesar 105 ribu per bulan. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 44 ribu per bulan. Menurut Siti, peningkatan ini seiring dengan perbaikan tata kelola berupa debirokratisasi dan deregulasi.

Dalam menjalankan program perhutanan sosial, Kementerian LHK menerapkan kebijakan afirmatif, yakni meningkatkan rasa keadilan bagi masyarakat, termasuk masyarakat adat.

"Langkah korektif ini juga mendorong perbaikan masyarakat dan demokratisasi dalam tata kelola lahan," kata Siti di gedung Kementerian LHK, Jakarta, awal pekan ini.

Terdapat tiga langkah yang diaplikasikan dalam kebijakan ini. Pertama, mempertegas perluasan kesempatan kerja perdesaan dari 586 ribu KK yang mendapatkan SK hutan sosial. Kedua, mendorong sentra produksi rakyat yang menggerakkan ekonomi baru di desa-desa. Terakhir, mengintegrasikan ekonomi hutan sosial ke dalam sektor formal ekonomi Indonesia.

Melalui kebijakan ini, Siti optimistis realisasi izin hutan sosial

sebanyak 12,7 juta hektare dapat selesai pada lima hingga delapan tahun lagi. Saat itu juga, proporsi masyarakat terhadap hutan dapat meningkat, meski korporasi tetap mendominasi.

"Kalau sekarang porsinya masih 95 banding 5, nanti bisa 70 banding 30," tutur Siti.

Tantangan lain dalam menjalankan program perhutanan sosial adalah mendorong kapasitas kelola usaha hutan sosial. Siti mengatakan, untuk mengantisipasinya, peningkatan kapasitas SDM menjadi prioritas, di antaranya kapasitas pendamping, kelompok tani hutan, dan kesatuan pengelolaan hutan melalui bakti rim-bawan.

Aktivis kehutanan Tosca Santoso mengatakan, tantangan terbesar dalam implementasi program perhutanan sosial adalah pendampingan masyarakat. Dengan keterbatasan pemahaman, mereka harus diberikan pendampingan dari tahapan persiapan hingga implementasi.

Pendampingan dibutuhkan agar tanaman yang ada di hutan sosial dapat menghasilkan nilai ekonomi dan ekologi secara maksimal. Berdasarkan pengalaman dia mendampingi petani di Sarongge, Cianjur, masyarakat bisa mendapatkan Rp 5 juta per bulan per 0,7 hektare.

"Total itu dari kopi maupun

tanaman lindungnya," ujar Tosca di lokasi yang sama.

Perhutanan sosial merupakan program bagus dan kesempatan besar bagi para petani bila mereka mendapatkan pendampingan dengan benar. Hal tersebut tidak hanya dari akademisi dan para ahli, tetapi juga pemerintah daerah hingga pusat.

Selain pendampingan, perbaikan birokrasi juga harus ditingkatkan dengan melibatkan pemerintah daerah secara maksimal. Pasalnya, pendapatan yang diraih dari program ini juga akan memberikan kontribusi kepada pendapatan domestik bruto (PDB) daerah.

Tosca memberikan contoh Cianjur yang memiliki area hutan hingga 70 ribu hektare. Apabila seperempatnya saja dimasukkan dalam program perhutanan sosial, akan tersedia area baru 17.500 hektare yang bisa produktif.

"Dari total itu, bisa menanam-bahkan PDB lokal hingga Rp 2 triliun jika masyarakat dapat menanam kopi di situ," ucapnya.

Potensi lainnya yang tidak kalah besar terletak di Kabupaten Bogor. Kawasan hutan di sana mencapai 50 ribu hektare. Bila seperempatnya masuk ke perhutanan sosial, PDB diperkirakan bertambah Rp 1 triliun sekaligus memperluas lapangan kerja warga lokal. ■ ed: fuji pratiwi